

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan proposisi organisasi. Sederhananya, kinerja adalah menyelesaikan pekerjaan. Kinerja juga dapat dianggap sebagai hasil kerja seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi anggaran dapat dianggap sebagai pernyataan mengenai perkiraan pekerjaan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam hal keuangan. Dengan demikian, definisi anggaran adalah pernyataan perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam bentuk keuangan (Rolianti, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ditetapkan bahwa anggaran adalah dokumen penting yang dibentuk oleh kesepakatan antara eksekutif dan parlemen tentang biaya persiapan urusan pemerintahan dan yang pendapatannya bertujuan untuk memenuhi pengeluaran yang diperlukan atau kebutuhan pengeluaran dalam bentuk untung atau rugi, serta anggaran mengkoordinasikan urusan pemerintahan, biaya dan anggota dasar bagi upaya peningkatan pendapatan dan keuangan pemerintah periode waktu biasanya diikuti dengan periode tahunan. Tapi tidak itu juga mengecualikan bahwa anggaran dibuat untuk periode tertentu yang lebih pendek atau lebih lama dari satu tahun kapasitas keuangan adalah potensi pemerintah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010)

Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintah atau lembaga yang tujuannya tidak untuk mendapatkan keuntungan, dan merupakan suatu bagian dari kedisiplinan ilmu. Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat mengelola anggaran secara akuntabel, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya

untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat, sedangkan transparansi publik pada pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan sebenar-benarnya agar dapat dimengerti dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Kristanti, 2019).

Setiap organisasi di pemerintahan bagian dari sektor publik yang menjadi sorotan publik karena pengelolaan keuangan yang tidak efisien, kebocoran dana, pemborosan dana, kehilangan uang dari waktu ke waktu. *Value for money* merupakan prinsip yang digunakan sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang baik. Perwujudan prinsip harga-kualitas dapat mengubah banyak masalah, sehingga penerapan manajemen tidak didasarkan pada rasio harga-kualitas. *value for money* harus dicapai dalam tata kelola perekonomian daerah karena dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan mata rantai yang mendorong pemerintah daerah untuk mencapai *good governance*, yaitu Pemerintahan daerah yang terbuka, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien (Hermanto, 2020).

Organisasi Perangkat Daerah bagian sektor publik sering kali dievaluasi inefisiensi, pemborosan, sumber daya dan institusi yang selalu merugi. Apalagi saat berbelanja, sering terjadi pembelian langsung penggunaan anggaran yang tidak tepat, sehingga tujuan keuangan tidak tercapai efisien dan mengesankan sehingga manfaat atau hasil pelayanan publik sulit dilihat efisiensi anggaran dan mengutamakan penggunaan dibandingkan dengan penghematan begitu banyak dana anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak ada efisiensi anggaran dan banyak penggunaan anggaran yang berbeda dari tujuan politik pemerintah. Masalah lain adanya kelemahan dalam fungsi anggaran perencanaan alokasi anggaran mengarah pada hasil yang buruk oleh karena itu pemerintah ada unit tenaga kerja yang kelebihan dana dan ada juga unit tenaga kerja yang tidak memiliki dana (Satriani, 2022).

Fenomena terkait kinerja anggaran di Kota Bandar Lampung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung menemukan kebocoran anggaran sebesar Rp5,1 miliar. Terkait temuan itu, Inspektur Kota Bandar Lampung mengungkapkan pihaknya telah melakukan langkah-langkah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan itu. Ia mengaku progres penanganan temuan itu sudah 75%. Rekomendasi BPK yang harus dipulangkan Rp5,1 miliar, sudah 75% yang ditindak lanjuti, ungkapnya usai rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, Menurutnya, temuan itu hasil pemeriksaan BPK terhadap kegiatan-kegiatan fisik di Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Terkait hal itu, Wali Kota Bandar Lampung dan pihaknya menyerahkan temuan itu kepada inspektorat. Pihaknya siap menindaklanjuti hal itu jika temuan yang dimaksud benar ada. Sementara itu, Juru Bicara Pansus Pembahasan dan Pengawasan Tindaklanjut LHP BPK RI terhadap kinerja atas pengelolaan PAD menyampaikan pihaknya menemukan kebocoran pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung pertengahan 2019 sampai Semester 1 tahun 2021. Laporan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II dan dihadiri 33 anggota DPRD Kota Bandar Lampung serta wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung (Sumber: Lampost.com, 2022).

Value for money didefinisikan suatu konsep penilaian kinerja, khususnya dalam organisasi sektor publik, yang dilakukan berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja, dengan mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya konsep *value for money*, akan didapatkan berbagai informasi berupa indikator mengenai anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya selain penilaian kinerja finansial, dalam konsep *value for money* terdapat pula penilaian yang sifatnya non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten, yang dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Pertama adalah ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah, Ekonomi merupakan perbandingan input

dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter yang secara umum terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan, efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan, efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (Mardiasmo, 2018:5).

Faktor untuk mencapai kinerja anggaran yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan tindakan dan kinerja dari seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dikatakan bahwa aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas yaitu publik memiliki hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Akuntabilitas juga merupakan sebuah instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Aplikasi akuntabilitas didalam penyelenggaraan pemerintah diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik, pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaiannya sehingga program tersebut dapat memberikan hasil ataupun dampak semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan (Rolianti, 2022).

Faktor untuk mencapai kinerja anggaran yang baik adalah transparansi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang

undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010)

Faktor untuk mencapai kinerja anggaran yang baik adalah pengawasan. Pengawasan yaitu proses yang terjadi secara teratur terus-menerus atau terus-menerus mengamati, memahami dan untuk menyelidiki setiap perilaku kegiatan tertentu untuk mencegah atau mencegah mereka mengoreksi kesalahan atau perbedaan, pengawasan proses pemantauan kinerja untuk menjaga operasi tetap berjalan diarahkan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dirancang melakukan tinjauan, melawan kerja sama kegiatan yang menyimpang atau tidak dimaksudkan yang diarahkan (Kristanti, 2019).

Faktor kinerja anggaran yang baik yaitu partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran adalah salah satu pendekatan mendalam dari bawah ke atas proses penyusunan anggaran, dimana data anggaran mengalir melalui sebuah sistem partisipatif dimulai dari tingkat akuntabilitas yang lebih rendah di tingkat tersebut tanggung jawab yang lebih besar. Setiap orang bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya/pendapatan harus menyiapkan perkiraan anggaran dan mendelegasikannya kepada manajemen puncak. Penilaian kemudian tinjau, konsolidasi dalam pergerakannya ke level yang lebih tinggi manajemen puncak (Garrison, 2013).

Faktor kinerja anggaran yang baik adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah informasi laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran disampaikan tepat waktu, maka proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Selain itu, ketepatan waktu proses penutupan anggaran, pelaporan keuangan dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk memberikan informasi yang relevan sehingga kinerja anggaran dapat berjalan baik (Satriani, 2022).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rolianti, 2022) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran berbasis *value*

for money (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten pesawaran)”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel ketepatan waktu serta perbedaan objek penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah disampaikan, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Partisipasi Anggaran dan Ketepatan Waktu Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdapat pada objek penelitiannya yaitu di Organisasi Perangkat pemerintah Kota Bandar Lampung. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari akuntabilitas, transparansi, pengawasan, partisipasi anggaran dan ketepatan waktu. Sedangkan variabel dependen yaitu Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggran berbasis *value for money*?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggran berbasis *value for money*?
3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggran berbasis *value for money*?
4. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggran berbasis *value for money*?
5. Apakah ketepatan waktu berpengaruh terhadap kinerja anggran berbasis *value for money*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ketepatan waktu terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh sarjana ekonomi dan mempraktekan ilmu-ilmu yang telah dipelajari dalam mata kuliah perkuliahan.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan langkah yang diambil dalam pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, partisipasi anggaran dan ketepatan waktu terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

c. Bagi Akademik

Sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, seperti *ground theory*, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi atas simpulan penelitian serta saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**